

Rasulullah Saw bersabda, "Allah memperlihatkan kepadaku seluruh  
penjuru bumi ini. Aku melihat bagian Timur dan Baratnya, dan  
aku melihat umatku akan menguasai apa yang telah  
Dia tunjukkan kepadaku."

— HR. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Namanya sangat familier, namun (mungkin) tidak demikian dengan pemikiran besarnya. Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi (1890-1949), pahlawan nasional asal Minahasa, yang di dunia pergerakan dikenal dengan Sam Ratulangi. Menurut Dakhidae (2000:642-644), Sam Ratulangi tidak memilih berpolitik radikal, tetapi memilih politik “ko” dengan menjadi anggota *Volksraad* pada tahun 1927, bersama Husni Thamrin dan Soetardjo Kartohadikoesoemo. Posisinya di dalam *nationale fractie* Dewan Rakjat mendapat tentangan keras dari kaum Belanda; hingga akhirnya ia dijemput dalam suatu skandal keuangan perjalanan dinas, diadili, dan divonis empat bulan penjara serta *diskors* selama tiga tahun. Selama menjalani hukuman penjara di Sukamiskin, waktunya digunakan untuk merenung dan menulis buku *Indonesia in den Pacific. Kernproblemen van den Aziatischen Pacific*.

Buku dengan kata pengantar dari Mr. Soetardjo tersebut diterbitkan pada bulan Juni 1937. Pada tahun 1982, dialihbahasakan oleh S. I. Poeradisastra dan diterbitkan kembali dengan judul *Indonesia di Pasifik. Analisa Masalah-Masalah Pokok Asia Pasifik*. Buku yang oleh banyak kalangan diakui sebagai karya seminal ini, dibuka dengan paragraf berikut.

“Pada saat ini diketahui oleh hampir setiap orang, bahwa di Pasifik telah terbentuk sebuah kawasan politik tersendiri. Kawasan itu mengesampingkan, malah melebihi arti dunia lama Samudra Atlantik. ...” (Ratulangi, 1982:1)

Menurut Ratulangi (1982:23-25), semua itu didahului oleh proses pertumbuhan kekuasaan yang berpengaruh kuat yakni perubahan nisbah modal internasional. Akibat Perang Dunia I, terjadi perubahan hubungan modal internasional, yang tidak pernah terbayangkan dalam psikosis peperangan tahun 1914. Perubahan inilah yang telah menempatkan kawasan Pasifik sebagai fokus utama yang baru, di mana sebelumnya, Samudra Atlantik dianggap lautan dunia yang dipersengketakan bagi hegemoni ketatanegaraan dan ekonomi.

Perang Dunia (PD) I telah mengakibatkan perpindahan modal secara hebat. Amerika dan Jepang bukan lagi negara yang untuk keperluan uang di bidang pemerintahan maupun swasta harus mendatangi pasar uang Eropa. Selama dan karena PD I, kedua negara telah menjadi kreditur berkat perkembangan industri-nya. Ratulangi menggambarkan sebagai kemunculan suasana baru dengan kemampuan sendiri untuk mengatur dunia dan perekonomiannya, sesuai perubahan situasi saat itu.

"Inilah sekarang Kawasan Pasifik. Landasan kawasan ini adalah New York - Tokyo yang dihubungkan ke Nanking dan Kanton, dan meliputi seluruh Lautan Teduh yang sama sekali tak teduh-tenang lagi. Tetapi lautan ini senantiasa membuncah gemuruh karena datang dan perginya kapal-kapal niaga semua bangsa (negara) maritim, dan latihan perang-perangan armada-armada Angkatan Laut Amerika, Inggris, Jepang, dan Perancis yang simpangsiur mengitari sudut barat-daya Pasifik." (Ratulangi, 1982:28)

Ratulangi (1982:33-57) membagi kekuasaan di Asia Pasifik ke dalam "Empat Perserangkaian: Barat, Timur, Utara, dan Selatan"; di mana masing-masing memiliki kepentingan di dunia. Tiga kepentingan kolonisasi oleh Inggris, Perancis, dan Belanda berdesakan masuk ke Pasifik dari Selatan. Pintu gerbang masuk secara geografis adalah Indonesia, sedangkan secara nonfisik (*geestelijke*) adalah sistem kolonial. Perserangkaian Selatan masih ditambah dengan dominion Australia dan Selandia Baru. Perserangkaian Timur terbentuk oleh kepentingan Amerika, di mana modal mereka ditanam di Asia Timur. Di sisi lain, penetrasi Asia oleh orang-orang Jepang dan Tiongkok ke Amerika Utara dan Selatan menimbulkan masalah penting. Perserangkaian Barat mencakup Jepang, Tiongkok, Siam, Mancukuo, dan Filipina (di kelak kemudian hari); di mana Jepang menjadi pemegang peranan utama. Sejak awal abad, Jepang di Timur Jauh tegak sebagai negara yang paling maju di dalam organisasi dan modernisasi kehidupan. Perserangkaian Timur menjadi subjek dan sekaligus objek, terlibat secara aktif dan pasif dalam permasalahan di Pasifik. Berpaling ke Perserangkaian Utara, Tsar Rusia menghendaki sebuah pelabuhan yang bebas es di Samudra Pasifik dan berupaya mendesak ke selatan, namun harus menghadapi peperangan melawan Jepang. Dalam Perjanjian Damai Portsmouth, Rusia harus mengakui kedaulatan Jepang atas Korea dan hak-hak istimewa Jepang di Mancuria Selatan.

Wilayah Pasifik telah menciptakan kawasan ekonomi dan politik tersendiri, dengan permasalahannya sendiri, di mana basis dasarnya adalah Amerika dan Jepang (Ratulangi, 1982:59). Bagi Asia Pasifik secara keseluruhan, kawasan di sebelah Utara bersifat industrialis dan secara internasional aktif, sementara di sebelah Selatan bersifat agraris dan secara internasional pasif (Ratulangi, 1982:93). Menurut Ratulangi (1982:131-132), situasi ekonomi geografis sebuah negeri menentukan kedudukannya dalam pergaulan dunia internasional, aktif atau pasif. Letak Indonesia di Asia Pasifik sangat istimewa, secara geografis merupakan jembatan antara daratan Asia dan benua Australia. Jawa dan Nusa Tenggara (dahulu disebut Kepulauan Sunda Kecil) yang merupakan sebuah rangkaian lanjutan dari Malaya hingga bersambung ke sebelah Timur dengan Australia, bersama dengan Sumatera menjadi pintu gerbang antara dua samudra, yakni Pasifik dan Hindia. Semua jalan penghubung antara kedua samudra melewati Kepulauan Indonesia. Letak geografis ini memberi Indonesia sebuah kedudukan penentu di dalam lalu lintas ekonomi dan budaya; di satu pihak perserangkaan Afrika, Hindia-Muka dan Hindia-Belakang (kini Pakistan, Bangladesh, dan India serta Indo-Cina), Persia (sekarang Iran), Asia Kecil, dan Eropa; di pihak lainnya negeri-negeri Asia Pasifik dengan Amerika dan Australia sebagai lanjutan lalu lintas ekonomi. Ditinjau secara demikian, Indonesia terletak di pusat sebagian lalu lintas perdagangan dunia, terutama melalui Selat Malaka dan Selat Sunda.

Pada umumnya, arti Indonesia bagi Pasifik dan perekonomian dunia, menurut Ratulangi (1982:137) mengandung tiga hal yang bersifat pasif: negeri konsumen, negeri sumber bahan mentah, dan negeri tempat penanaman modal. Indonesia mempunyai ciri-ciri yang khas, yaitu: (a) secara geografis ekonomi (*geografo-economisch*): letaknya di tengah-tengah kawasan konsumsi dan produksi sehingga menduduki posisi penentu di dalam lalu lintas perekonomian dunia; (b) secara geo-ekonomi (*geo-economisch*): tanahnya mengandung kekayaan bahan mentah mineral, permukaan tanahnya dapat menghasilkan bahan mentah pertanian bagi perekonomian dunia; (c) secara ekonomi sosial (*socio-economisch*): penduduknya giat bekerja sekalipun memiliki tingkat penghidupan yang rendah, sementara jumlah penduduk sebanyak enam puluh juta jiwa merupakan konsumen

hasil industri yang bernilai ratusan juta *gulden* setiap tahunnya; (d) secara iklim (*klimatologisch*): memiliki iklim tropis dengan musim yang teratur; (e) secara keuangan: ketiadaan modal nasional dalam negeri dan kekosongan industri. Keenam ciri tersebut telah menarik perhatian dan aktivitas modal dari luar negeri. Akan tetapi, menurut Ratulangi (1982:150), di atas segala-galanya, negeri dan rakyat Indonesia sendiri merupakan unsur pasif di dalam perhatian dan kegiatan internasional.

Hampir tiga perempat abad kemudian, pemikiran Sam Ratulangi diangkat kembali oleh Sinyo Harry Sarundajang dalam sebuah disertasi berjudul *Geostrategi Provinsi Sulawesi Utara Sebagai Pintu Gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik (Studi Mengenai Pengembangan Pemikiran Sam Ratulangi Tentang "Indonesia di Pasifik" dan Peranan Sulawesi Utara)*. Mencermati dinamika perkembangan kekuatan politik ekonomi global saat ini, Sarundajang (2011:93-96) menyatakan bahwa sesungguhnya apa yang dituliskan Sam Ratulangi mengenai akan datang saatnya era kebangkitan Pasifik yang ditandai munculnya negara-negara di kawasan Asia Pasifik sebagai kekuatan ekonomi politik global, sudah tampak. Kawasan Asia pun kini tampak menonjol. Selain semakin mendominasi perekonomian global, negara-negara Asia anggota G-20 juga memiliki peran yang lebih besar dalam menyelamatkan dan membentuk kembali sistem perekonomian global, menggeser dominasi AS dan Eropa Barat. Khusus ASEAN, wilayah ini dipandang sebagai salah satu kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Asia.

Menurut Sarundajang (2011:45), meskipun perekonomian kawasan Pasifik secara umum terus meningkat, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum setara dengan rerata pertumbuhan ekonomi negara-negara lain di kawasan Pasifik. Hal ini disebabkan karena Indonesia belum berhasil memanfaatkan dinamika kemajuan ekonomi kawasan Pasifik. Selain itu, belum berhasil menggali dan mengoptimalkan potensi internal kawasan, terutama keuntungan geografis dan geopolitik, khususnya Sulawesi Utara yang berada di bibir Pasifik, sebagaimana prediksi Sam Ratulangi.

Sarundajang (2011:11-12) berusaha mengeksplorasi, mengetahui, dan merumuskan kembali konsepsi dasar pemikiran Sam Ratulangi mengenai kondisi dan posisi geografis Indonesia yang sangat prospektif di Kawasan Asia Pasifik, khususnya Sulawesi Utara dalam konteks geopolitik yang melingkupi. Selanjutnya, konsepsi dari Sam Ratulangi dijadikan dasar dalam merumuskan strategi sebagai *roadmap* pembangunan Sulawesi Utara dalam rencana aksi yang harus dilakukan, serta untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam rangka mengimplementasikannya.

Dalam pemikiran Sarundajang (2011:173), upaya membangun Sulawesi Utara sebagai salah satu Pintu Gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik melalui keunggulan geostrateginya tidak dapat dilepaskan dari pembangunan NKRI secara keseluruhan. Termasuk di dalamnya membangun daerah di Kawasan Timur Indonesia (KTI) sebagai wilayah satu kawasan pembangunan dengan Sulawesi Utara, dilihat dari kedekatan geografis. Menjadikan Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia di kawasan Asia Pasifik, tidak semata-mata hanya untuk kepentingan dan kemajuan Sulawesi Utara, akan tetapi secara sinergis-interkoneksi menarik dan mendorong kemajuan KTI yang cenderung mengalami ketertinggalan, serta dalam rangka memperkuat daya saing nasional dan keutuhan NKRI sebagai suatu negara kepulauan (*archipelagic state*).

Berdasarkan perspektif tersebut, Sarundajang (2011:173-174) menyusun rencana dan program strategis pembangunan ekonomi yang saling terkoneksi dan terintegrasi. Dalam konteks pengembangan KTI, Sulawesi Utara dari aspek geostrategi berpotensi sebagai pusat distribusi perdagangan nasional, regional, dan internasional dengan pembagian: (1) Manado-Bitung sebagai pusat *distribution and sharing*; (2) *belt 1* berisi *hinterland nodes* di dalam Sulawesi Utara (misalnya: Siau, Tahuna, Airmadidi, Tondano, Amurang, Kotamobagu, dan seterusnya); (3) *belt 2* berisi *satelite node* di kota-kota provinsi tetangga (misalnya: Ternate, Gorontalo, Balikpapan, Ambon, Sorong, Palu, dan seterusnya); (4) *belt 3* berisi *other major nodes* di Indonesia (misalnya: Makassar, Surabaya, Jakarta, Bali, dan seterusnya); (5) *belt 4* berisi *resource node* (misalnya: Kuala Lumpur, Taipei, Tokyo, Darwin, Seoul, Vancouver, dan seterusnya).

## 1.2 Perumusan Masalah

Kalangan sejarawan menilai bahwa tidak ada yang perlu diragukan dengan buku *Indonesia di Pasifik. Analisa Masalah-Masalah Pokok Asia Pasifik* karya Sam Ratulangi. Luhulima (2004) menyatakan bahwa apa yang ditulis oleh Sam Ratulangi merupakan kajian Ekonomi Politik Internasional. Menurut Dakhidae (2000:647), buku ini semata-mata dimaksudkan sebagai suatu studi untuk membuat perhitungan tentang posisi Indonesia di Pasifik. Menurut Kawilarang (1999:15), Sam Ratulangi menuliskan analisis secara faktual dan kontekstual, dilengkapi referensi narasumber untuk memahami latar belakang permasalahan. Pembaca digiring menatap ke arah masa depan (futurologi). Meskipun penyajiannya cukup singkat, bila diuraikan secara lebih mendalam, tulisan tersebut akan menjadi buku tebal hingga terungkap posisi Indonesia dalam percaturan politik, ekonomi, dan keamanan dunia.

Menjadi menarik tatkala butir-butir pemikiran ekonomi-politik kawasan Pasifik dari Sam Ratulangi direvitalisasi menjadi "geostrategi Sam Ratulangi-an" dan diterjemahkan dalam strategi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara oleh Sarundajang. Berbekal fakta geografi dan geopolitik, meskipun Indonesia terletak di lokasi yang sangat strategis di kawasan Pasifik, namun dalam realita pembangunan nasional belum didayagunakan secara optimal. Menurut Sarundajang (2011:55-56), pembangunan sebagai geostrategi merupakan konsep kebijakan dan strategi pembangunan yang tidak hanya bermotif keuntungan secara ekonomis semata, tetapi juga yang mempunyai tujuan atau motif bersifat "politik-strategik", yaitu pembangunan yang mampu membawa kejayaan suatu negara di berbagai bidang. Artinya, dalam melakukan hubungan perdagangan internasional tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga membangun kekuatan, pengaruh, dan kejayaan negara.

Menurut Sarundajang (2011:46-47), konsep geostrategi dapat dipakai dalam hubungan dengan konsep geografi dan geopolitik. Geopolitik sebagai bagian dari ilmu geografi politik merupakan studi yang mempelajari perilaku politik suatu negara berdasarkan karakteristik fisik geografis. Faktor geografis seperti bentuk, luas, letak, iklim, sumber daya alam, maupun kependudukan;

sangat berpengaruh terhadap perilaku negara dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks ini, Sarundajang merujuk pendapat Jakub J. Grygiel yang menjelaskan dengan baik tentang konsep geografi, geopolitik, dan geostrategi yang ditentukan oleh tiga variabel geografi, yaitu: rute perdagangan, pusat sumber daya, dan batas-batas negara. Dalam sejarah perkembangan dunia, variabel geografik seperti rute perdagangan dan lokasi sumber daya alam menentukan nilai geopolitik suatu wilayah geografik. Wilayah yang dilewati jalur perdagangan dan memiliki sumber daya alam dianggap bernilai geopolitik. Variabel geografik berwujud batas negara memengaruhi penetapan geostrategi.

Mendasarkan pada konsepsi tersebut, Sarundajang (2011:49) merumuskan pernyataan hipotetik berikut. Kebijakan luar negeri suatu negara akan berhasil kalau geostrategi yang diterapkan sesuai dengan kondisi geopolitiknya. Demikian juga sebaliknya, kebijakan luar negeri suatu negara akan gagal kalau geostrateginya tidak sesuai dengan kondisi geopolitik. Oleh karena itu, konsepsi geostrategi tidak dapat dipisahkan dengan konsep geografi dan geopolitik. Ketiga konsep tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat integratif, di mana geografi menggambarkan bentuk dan rupa fisik dari suatu wilayah, geopolitik menggambarkan bagaimana faktor manusia mengubah kondisi geografi, sedangkan geostrategi menggambarkan bagaimana upaya dan strategi dalam mendayagunakan dan mengoptimalisasikan potensi geografi dan geopolitik bagi kesejahteraan dan keamanan wilayahnya.

Menurut penulis, Sarundajang menggunakan penalaran deduktif untuk menarik strategi pembangunan ekonomi ke dalam geostrategi dengan logika silogistik berikut: (1) suatu upaya yang terencana dan komprehensif untuk mencapai tujuan utama dengan mempertimbangkan aspek geopolitik merupakan geostrategi; (2) pembangunan adalah berbagai upaya atau kebijakan dalam mencapai tujuan politik (pembangunan) dengan memanfaatkan keunggulan posisi geopolitik; karena itu (3) pembangunan merupakan geostrategi. Hal ini tersirat dalam kesimpulannya akan pemahaman geostrategi sebagaimana paragraf berikut.

“... dalam perkembangannya geostrategi diartikan sebagai pelaksanaan geopolitik dalam negara, yang pada awalnya diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer, yang berkaitan dengan arti strategi itu sendiri,



yaitu ilmu atau seni tentang perang. Strategi itu sendiri semula banyak dikembangkan oleh kaum militer, yakni bagaimana memenangkan perang. Namun kini istilah strategi juga digunakan oleh kalangan ekonom, industrialis, bahkan para ahli pembangunan; misalnya bagaimana memenangkan pasar untuk keperluan produk kita dan sekaligus untuk meyakinkan kita bahwa bahan baku terjamin lebih lama, serta bagaimana menggunakannya seefektif mungkin. Dengan demikian, geostrategi dapat didefinisikan sebagai suatu seni memanfaatkan kondisi negara dengan berbagai keunggulan potensi wilayahnya yang dapat didayagunakan melalui berbagai upaya atau kebijakan dalam mencapai tujuan politik pembangunan dengan memanfaatkan keunggulan posisi geopolitik wilayah (luas, letak geografi, sumber daya alam, dan SDM)." (Sarundajang, 2011:49-50)

Pada penalaran deduktif, bila premis-premis benar, kesimpulannya benar. Namun demikian, penalaran deduktif mempunyai keterbatasan. Kesimpulan silogisme tidak pernah dapat melebihi isi premis-premisnya. Oleh karena itu, harus dimulai dengan premis-premis yang benar agar dapat diperoleh kesimpulan yang dapat dipercaya. Premis (1) yang disusun oleh Sarundajang patut dipertanyakan. Ada pemaknaan geostrategi yang ditinggalkan oleh Sarundajang, yakni arti penting militer (*military*). Sebagaimana Lim Joo-Jock dalam *Geo-Strategy and the South China Sea Basin* (1979), Zbigniew Brzezinski dalam *Game Plan* (1986), Jakub J. Grygiel dalam *Great Powers and Geopolitical Change* (2006), dan/atau James Rogers dan Luis Simón dalam *Think Again: European Geostrategy* (2010) berpendapat bahwa geostrategi berkaitan dengan strategi, baik perencanaan strategik, tindakan strategik, maupun arti penting militer dalam memengaruhi politik luar negeri. Jika menelusuri konsepsi strategi, kluster, daya saing, ketahanan lokal (*local resilience*), pola angsa terbang (*flying geese*), rantai nilai global (*global value chain*), dan peta jalan (*roadmap*) yang dituliskan; boleh jadi strategi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara yang diwacanakan Sarundajang merupakan geoekonomi.

### 1.3 Tujuan

Jika disertasi Sarundajang tidak dimaksudkan untuk menguji teori atau membuktikan kebenaran prediksi Sam Ratulangi, tetapi berusaha untuk merumuskan kembali pemikiran Sam Ratulangi sehingga bisa dipakai untuk memanfaatkan keuntungan faktor geografis dan geopolitik Sulawesi Utara menjadi rumusan geostrategi yang bisa diterapkan (*workable*); skripsi ini akan menguji "kebenaran"

buah pemikiran Sarundajang tentang strategi pembangunan ekonomi sebagai geostrategi secara epistemologis. Jika tidak ditemukan kebenaran epistemologis di mana strategi pembangunan ekonomi berada di luar wilayah kajian geostrategi, selanjutnya akan dilakukan reinterpretasi ke bidang keilmuan geoeкономи berdasarkan variabel pencirinya.

#### **1.4 Kegunaan**

Para peneliti, termasuk penulis, sering terlena menggumuli berbagai aspek teknis pengetahuan ilmiah tanpa menyadari dengan benar apa yang sebenarnya sedang dipelajari. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam upaya menguasai ilmu dengan sedalam-dalamnya. Sejalan dengan hal itu, kajian ini berguna untuk, *pertama*, mengurai diskursus strategi pembangunan ekonomi sebagaimana diwacanakan oleh Sarundajang, termasuk geostrategi atau disiplin keilmuan lain sehingga tidak terjadi kekeliruan penerapan dan/atau perujukan ilmiah. *Kedua*, hasil kajian bisa menjadi referensi ilmiah geopolitik, geostrategi, dan geoeкономи bagi mahasiswa. *Ketiga*, kajian ini secara tersirat mengenalkan kembali pandangan “Ekonomi-Politik” karya futurolog Indonesia, Sam Ratulangi, tentang konstelasi negara-negara di tepian Pasifik yang sampai saat ini masih tetap aktual.

#### **1.5 Tinjauan Pustaka**

##### **1.5.1 Geografi**

Kata “geografi” pertama kali digunakan oleh sarjana Yunani, Erastosthenes, di abad ketiga sebelum Masehi. Berasal dari bahasa Yunani: *ge* (bumi) dan *graphe* (deskripsi), di mana geografi sebagai sebuah disiplin ilmu difokuskan pada deskripsi permukaan bumi sebagai dunia manusia. Studi tentang manusia adalah bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial, sedangkan ilmu (*science*) fokus pada studi tentang aspek alam (Dikshit, 2006a:1).

Geograf meneliti dunia melalui perspektif geografis atau spasial, menawarkan wawasan baru dalam disiplin terkait (Flint, 2006:1). Lebih lanjut, Flint (2006:2) menjelaskan perkembangan perspektif geografis. Pada pertengahan abad kedua puluh, geografi lebih menekankan pada deskripsi dan sintesis aspek fisik

dan sosial suatu wilayah. Kemudian banyak geografer mengadopsi pemahaman matematis hubungan spasial, seperti lokasi geografis kota dan interaksinya. Sekarang ini, geografi manusia tidak didominasi oleh satu visi tertentu, tetapi banyak perspektif teoretis dari ekonomi neo-klasik melalui Marxisme, feminisme, hingga pasca-kolonialisme dan berbagai bentuk *post-modernisme*.

Dipandang sebagai disiplin yang fokus pada hubungan manusia-lingkungan, menurut Dikshit (2006b:10), geografi secara tradisional terbagi menjadi dua cabang studi terpisah: geografi fisik dan geografi manusia, meskipun dalam periode pasca-1945 fokusnya telah bergeser semakin mendukung geografi manusia karena tumbuh realisasi antargeograf bahwa masalah yang diurus ahli geografi berkaitan dengan manusia dalam masyarakat semakin meningkat dan semakin kurang mengenai karakteristik fisik bumi. Hal ini lebih menekankan studi geografi sebagai ilmu sosial.

Semua disiplin ilmu sosial pada dasarnya terkait dengan masalah “organisasi manusia”; cara di mana manusia dalam masyarakat mengorganisir diri dan lingkungan mereka untuk tujuan tertentu. Konsep organisasi manusia merupakan sesuatu yang kompleks, setidaknya memiliki empat dimensi yang bisa diidentifikasi dengan jelas: ekonomi, sosial, politik, dan spasial. Masing-masing fokus dalam ilmu sosial terpisah. Dimensi ekonomi mendefinisikan lingkup umum dari studi ekonomi; dimensi sosial adalah fokus khusus dari ilmu perilaku termasuk sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial; dan dimensi politik adalah domain khusus ilmu politik. Dimensi keempat, spasial, adalah perhatian (*concern*) khusus dari geografi (Ginsburg, 1969 dalam Dikshit, 2006b:10). Lebih lanjut, menurut Dikshit (2006b:10), karena seluruh jejeran drama manusia harus diberlakukan di muka bumi, yakni di ruang geografis; masing-masing ilmu sosial memiliki dimensi spasial untuk keseluruhan organisasi sosial dan semua tindakan harus dibentuk spasial. Dengan demikian, geografi manusia secara tradisional telah terbagi menjadi tiga subdisiplin ilmu yang luas: geografi ekonomi, geografi sosial, dan geografi politik. Dilihat dari itu, geografi politik merupakan salah satu dari tiga cabang dasar geografi sebagai ilmu sosial.

### 1.5.2 Politik

Menurut Hoogerwerf (1972 dalam Budiardjo, 2008:21), obyek dari ilmu politik adalah kebijakan pemerintah, proses terbentuknya, serta akibat-akibatnya. Ilmu politik, menurut Easton (1971, dalam Budiardjo, 2008:21), adalah studi mengenai terbentuknya kebijakan umum (*study on the making public policy*). Kebijakan umum yang dimaksud adalah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Kebijakan (*policy*) itu sendiri merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya (Budiardjo, 2008:20).

Pelaksanaan kebijakan umum menyangkut pengaturan dan alokasi sumber daya alam memerlukan kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*). Kekuasaan diperlukan baik untuk membina kerja sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses tersebut. Cara yang dipakai dapat bersifat persuasif dan jika perlu bersifat paksaan (*coercion*). Tanpa unsur paksaan, kebijakan hanya merupakan perumusan keinginan belaka (Budiardjo, 2008:15). Akan tetapi, menurut Budiardjo (2008:15), berbagai kegiatan tersebut dapat menimbulkan konflik karena nilai-nilai—baik materiil maupun mental—yang dikejar biasanya bersifat langka. Pada sisi lain, di negara demokrasi, kegiatan itu juga memerlukan kerja sama karena kehidupan manusia bersifat kolektif. Dalam rangka ini, politik pada dasarnya dapat dilihat sebagai usaha penyelesaian konflik atau konsensus.

Ilmu politik tidak hanya berhubungan secara terbatas dengan sejarah dan filsafat, tetapi juga dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya, seperti: sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, dan ilmu bumi sosial. Semua ilmu sosial mempunyai obyek penyelidikan yang sama yaitu manusia sebagai anggota kelompok (*group*). Mereka mempelajari tingkah laku manusia serta cara-cara manusia hidup serta bekerja sama (Budiardjo, 2008:28).

Menurut Budiardjo (2008:35), faktor-faktor yang berdasar geografi, seperti: perbatasan strategis (*strategic frontiers*), daerah pengaruh (*sphere of influence*) dan desakan penduduk (*population pressure*); memengaruhi politik. Montesquieu, seorang sarjana Perancis, untuk kali pertama membahas bagaimana faktor-faktor geografi memengaruhi konstelasi politik suatu negara. Sementara itu, Rudolf Kjellén menganggap bahwa di samping faktor ekonomi dan antropologi, geografi memengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat dan karena itu mutlak harus diperhitungkan dalam menyusun politik luar negeri dan politik nasional (Budiardjo, 2008:35).

### 1.5.3 Geografi Politik

Salah satu pesona abadi masyarakat manusia (*human society*) adalah cara di mana persaingan klaim atas kontrol dan dimainkannya pengelolaan tanah dan sumber daya. Berbeda dengan mitos kerukunan Macaulay Roma kuno, kenyataannya bahwa individu-individu dan kelompok-kelompok kepentingan dari semua jenis dan di semua tingkatan terus saling berlomba untuk mempromosikan kepentingan mereka sendiri sehingga menggoyahkan dan mengubah tatanan yang ada dan memperbarui dunia dalam imaji mereka sendiri. Geografi politik, dalam arti luas, adalah studi akademis dari semua variasi konflik sumber daya dan cara di mana itu diselesaikan. Dengan kata lain, tentang kekuatan yang berusaha untuk membentuk dunia yang kita huni, dan bagaimana mereka bermain sendiri keluar dari bentangan lanskap dunia (Blacksell, 2006:1).

Penggunaan istilah geografi politik dimulai sejak tahun 1750-an, saat filsuf Perancis, Turgot, menciptakannya untuk menunjukkan hubungan antara fakta geografis atas tanah dan pertanian dalam masalah permukiman serta distribusi etnis dalam pengaturan politik. Geografi politik dipahami sebagai cabang pengetahuan bagi pemerintah dan administrasi sebagai pengetahuan negara (Agnew *et al.*, 2003:2-3). Menurut Efimenco (1957:3), geografi politik terdiri dari deskripsi dan analisis daerah yang terorganisir secara politik. Menurut Weigert *et al.* (1957:3), geografi politik adalah anak sah dari geografi manusia. Keduanya berurusan dengan saling pengaruh antara faktor-faktor fisik dan manusia serta

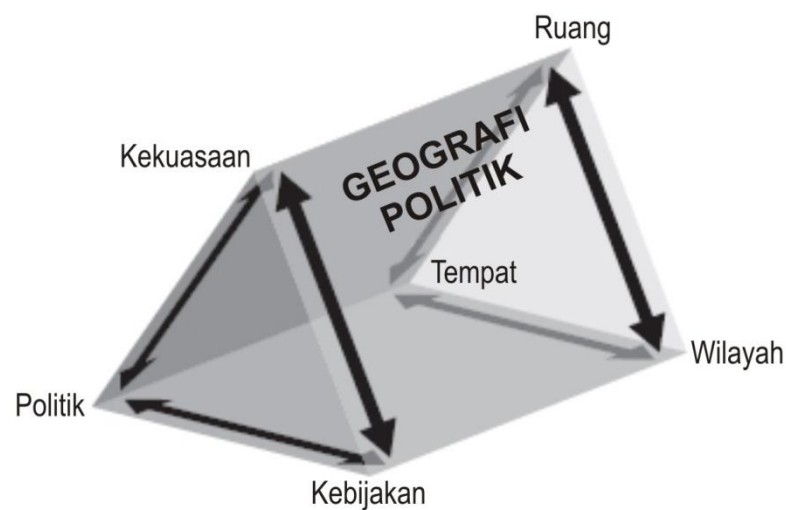
hubungan timbal baliknya antara bumi dan manusia. Keduanya mencoba untuk menemukan dan menjelaskan pengaruh dari dunia fisik terhadap masyarakat manusia dan batasan-batasannya mengatur aktivitas manusia; berurusan dengan beragam manifestasi simbiosis antara alam dan manusia.

Geografi politik sebagai sebuah bidang studi, telah mengalami perkembangan historis, di mana tema perbatasan dan ketenteraman serta kekuasaan dan perlawanan selalu menjadi pokok kajiannya. Bagi Agnew *et al.* (2003:2), geografi politik adalah tentang bagaimana hambatan antara manusia dan komunitas politik mereka naik-turun; bagaimana tatanan dunia berdasarkan prinsip pengorganisasian geografis yang berbeda (seperti: kerajaan, sistem negara, dan hubungan ideologis-material) timbul dan runtuh; dan bagaimana proses material dan kembalinya gerakan politik membuat orang tetap tinggal bermukim dan membayangkan peta politik dunia. Para pendahulu geografi politik, seperti: Aristoteles, Thucydides, Sun Tzu, dan Livy; serta eksponen yang lebih baru, seperti: Machiavelli, Hobbes, Montesquieu, Madison, Rousseau, dan Hegel telah menggunakan istilah ini untuk menggambarkan organisasi politik ruang duniawi dan hubungan antara tempat dan politik (Agnew *et al.*, 2003:3).

Weigert *et al.* (1957:5) menyatakan bahwa geografi politik terkait aspek tertentu dari hubungan bumi-manusia dengan perhatian khusus. Ini bukanlah hubungan antara lingkungan fisik dan kelompok manusia atau masyarakat, tetapi hubungan antara faktor-faktor geografis dan entitas (kesatuan) politik. Sesungguhnya, ihwal pengaturan manusia akan pengaruh ruang, sejarah, dan budaya atas pola geografis terkait dengan organisasi politik; dalam hal ini merupakan bidang/dunia geografi politik. Unit wilayah kajian geografi politik, semuanya berbicara tentang negara dan bangsa. Tujuan geografi politik adalah untuk menentukan bagaimana organisasi ini dipengaruhi oleh dan menyesuaikan dengan kondisi fisiografis, serta bagaimana faktor-faktor ini memengaruhi hubungan internasional.

Jones *et al.* (2004:2-3) mendefinisikan geografi politik sebagai sebuah gugus kerja (*cluster of work*) di dalam ilmu-ilmu sosial yang terlibat dengan beberapa pertemuan "politik" dan "geografi", di mana dua istilah ini dibayangkan

sebagai konfigurasi segitiga (lihat Gambar 1.1). Pada satu sisi adalah segitiga kekuasaan, politik, dan kebijakan. Kekuasaan merupakan hal utama penopang dua yang lain. Politik adalah seluruh rangkaian proses yang terlibat dalam mencapai, menjalankan, dan menentang kekuasaan atas fungsi negara dalam pemilu, perang, ataupun sekedar gosip kantor. Kebijakan adalah hasil yang diharapkan, hal-hal di mana kekuasaan memungkinkan seseorang untuk mencapainya dan bahwa politik itu tentang berada pada posisi yang dapat menyelesaikannya.



Gambar 1.1 Geografi Politik: Interaksi Antara “Politik” dan “Geografi”  
(Sumber: Jones *et al.*, 2004:3)

Interaksi dari tiga entitas ini menjadi perhatian dari ilmu politik. Geografi politik adalah tentang interaksi entitas ini dengan segitiga kedua yaitu ruang, tempat, dan wilayah. Pada segitiga kedua ini, ruang (atau pola spasial atau hubungan keruangan) merupakan inti pokok geografi. Tempat adalah titik tertentu dalam ruang, sedangkan wilayah menunjukkan upaya yang lebih formal untuk mendefinisikan dan membatasi sebagian ruang, dituliskan dengan identitas dan karakteristik tertentu. Geografi politik mengenali keenam entitas (politik, kebijakan, kekuasaan, ruang, tempat, dan wilayah) terkait secara intrinsik, kendatipun demikian, bagian dari penelitian geografi politik tidak perlu secara eksplisit menyebutkan keenamnya. Variasi spasial dalam implementasi kebijakan yang menjadi perhatian geografi politik, misalnya pengaruh identitas wilayah terhadap perilaku pemilih, bisa menjadi contoh penjelas. Geografi politik merangkul inter-

aksi yang tak terhitung banyaknya. Beberapa di antaranya mungkin memiliki dimensi budaya yang menjadi perhatian ahli geografi budaya. Beberapa di antaranya lagi mungkin memiliki dimensi ekonomi yang juga menjadi perhatian bagi ahli geografi ekonomi. Sementara itu, beberapa di antara yang lainnya terjadi di masa lalu dan dipelajari oleh ahli geografi sejarah (Jones *et al.*, 2004:3).

Oleh karena gagasan keliru tentang pemisahan masyarakat dan ruang, menurut Dikshit (2006b:10), seperti cabang-cabang lain dari geografi manusia, geografi politik difokuskan pada studi hubungan antara geografi dan politik, lebih tepatnya antara wilayah di bumi dan tindakan politik dan organisasi, di mana keduanya (ruang dan politik) dipandang sebagai bidang yang terpisah. Jadi fokus penelitian tetap pada bagaimana geografi (ruang fisik) memengaruhi politik, dan pada gilirannya dipengaruhi oleh organisasi dan tindakan politik. Sebelum tahun 1935, sebagian besar dunia fokus pada pandangan terdahulu bahwa geografi berpengaruh pada politik. Menurut Blacksell (2006:1), sejak kemunculannya, geografi politik sebagai subdisiplin dalam geografi manusia kontemporer telah tampak naik dan juga kejatuhan pamornya, namun sekarang mapan kuat pada intinya.

#### **1.5.4 Geopolitik**

Semua konsep memiliki sejarah dan geografis, istilah geopolitik pun tak terkecuali. Mula diciptakan pada tahun 1899 oleh seorang ilmuwan politik Swedia bernama Rudolf Kjellén (1864-1933), kata “geopolitik” memiliki sejarah panjang dan beragam pada abad ke-20, bergerak jauh melampaui makna aslinya dalam karya Kjellén untuk menandai perhatian umum antara geografi dan politik (*geopolitics*). Definisi yang spesifik tentang geopolitik pun terkenal sulit karena makna konsep geopolitik cenderung berubah sebagaimana periode sejarah dan struktur tatanan dunia mengalami perubahan (O’Loughlin, 1994 dalam Ó Tuathail, 1998c:1). Geopolitik adalah tentang perspektif, tentang bagaimana seseorang memandang dunia (Sempa, 2002:1). Geopolitik adalah komponen geografi manusia sehingga untuk bisa memahaminya harus memahami geografi manusia (Flint, 2006:1).



Taylor (2000:375) berusaha untuk meletakkan geopolitik ke dalam beberapa perspektif institusional. Menurutnya, sebagai sebuah subdisiplin, geopolitik amatlah kecil sekalipun berubah dalam ukuran lintas negara dan waktu. Dibandingkan dengan disiplin serupa dalam departemen Hubungan Internasional di perguruan tinggi dan banyak jurnal, geopolitik memiliki hubungan yang lemah. Orang dapat memandang geopolitik sebagai periferi dari sebuah periferi dari sebuah periferi (*periphery of a periphery of a periphery*); diletakkan pada perbatasan geografi manusia, yang akhirnya tidak pernah berdiri sendiri dalam inti ilmu sosial. Taylor menganggap hal ini sebagai analogi yang agak kejam dan kasar, akan tetapi para penulis geopolitik tidak kelihatan memiliki ketakutan oleh peletakkan intelektual seperti itu. Mereka malah menemukan geopolitik dalam segala hal, dari politik tingkat tinggi hingga budaya populer, sehingga studi mereka yang begitu penting itu berada di luar seluruh proporsi dari ukuran sub-disiplin yang ada.

Geopolitik sebagai pemikiran dan praktik, terkait dengan pembentukan negara dan negara-bangsa sebagai lembaga politik yang dominan. Geopolitik awalnya dipahami sebagai ranah konflik antarnegara dengan asumsi bahwa satu-satunya negara yang sedang dibahas adalah negara-negara Barat yang kuat. Ada upaya teoretis untuk memisahkan geopolitik dari imperialisme, dominasi negara kuat atas negara lemah (Flint, 2006:17).

Tabel 1.1 Ciri-Ciri Geopolitik Klasik

Kedudukan istimewa penulis ( <i>privileged position of author</i> )	kulit putih, laki-laki, golongan atas ( <i>elite</i> ), dan berpengetahuan Barat
Perspektif maskulinitas	semua yang terlihat dan diketahui ( <i>all seeing and all knowing</i> )
Pelabelan/klasifikasi	wilayah memberikan nilai dan makna
Anggapan terhadap teori objektif dan sejarah	kebenaran universal digunakan untuk menjustifikasi kebijakan luar negeri
Penyederhanaan ( <i>simplification</i> )	sebuah slogan ( <i>catchphrase</i> ) untuk membantu perkembangan dukungan publik
Negara-sentris ( <i>state-centric</i> )	politik kedaulatan negara teritorial

Sumber: Flint (2006:17)

Di Jerman, geopolitik berkembang dalam suasana kekecewaan akibat kekalahan mereka dalam PD I. Pada tahun 1917, visi dominasi Jerman telah tampak mendekati kenyataan dengan pengaruh kekuasaannya membentang dari Dunkirk hingga Riga dan dari Hamburg hingga Baghdad. Namun, dua tahun kemudian, mimpi kerajaan digantikan oleh kenyataan pahit dengan berkurangnya wilayah kekuasaan secara drastis, terpotong Koridor Polandia menjadi dua region, serta mengalami kelebihan jumlah penduduk (Schnitzer, 1955:407-408). Geopolitik, nama ilmu baru yang mendapatkan perhatian saat itu, menjelaskan bagaimana kekalahan menjadi tak terhindarkan tatkala Jerman menyimpang dari ajaran geopolitik yang sudah sangat jelas. Ilmu baru tersebut mengulurkan harapan bahwa melalui studi intensif dan wawasan yang lebih mendalam, maka kemenangan boleh jadi dapat direnggut (Schnitzer, 1955:408).

Kekalahan Jerman pada tahun 1945 dan kematian Karl Haushofer pada tahun 1946, berarti akhir dari aliran geopolitik Jerman. Berakhirnya perang juga memadamkan tradisi geopolitik di negara-negara poros yang lain, seperti Italia dan Jepang (Hepple, 1986:22). Sebenarnya, geopolitik sebagai aktivitas politik tidak pernah hilang, akan tetapi lebih dari satu generasi pasca-PD II hampir diabaikan oleh ahli geografi politik yang malu dengan penggunaannya meski telah dilekatkan ke nama mereka (Agnew and Corbridge, 1995 dalam Blacksell, 2006:10). Berasosiasi dengan geopolitik Jerman, hampir membawa geopolitik pada kematian (Hepple, 1986:22). Kemunduran ini, tentu saja dapat dijelaskan bahwa selagi geopolitik sebagai suatu istilah dihindari karena konotasi Nazi-nya, interpretasi dan analisis geopolitik tetap berlanjut, tetapi menyaru (*sailed under such other colours*) sebagai studi strategi ataupun geografi politik (Hepple, 1986:23).

Pembaruan atensi pada skala global telah membangkitkan kembali minat para ahli geografi politik dalam geopolitik. Terbebas dari kebuasan sebelumnya dan terkubur oleh perang Jerman, geopolitik merupakan cabang hidup (eksis) geografi politik; menganalisis cara di mana negara berhubungan satu sama lain membentuk kelompok-kelompok kepentingan yang koheren dalam dunia yang semakin global dan mendunia (Ó Tuathail and Dalby, 1998:1). Selama bertahun-

tahun semenjak Perang Dingin, geopolitik digunakan untuk menggambarkan kontestasi global antara AS dan Uni Soviet akan pengaruh dan kontrol atas negara dan sumber daya strategis di dunia. Mantan Sekretaris Negara AS, Henry Kissinger, menghidupkan kembali istilah tersebut pada tahun 1970-an, menggunakannya sebagai sinonim untuk permainan adidaya politik imbalan kekuatan yang terbentang di atas peta politik dunia (Hepple, 1986:25-26). Sekarang geopolitik digunakan secara bebas untuk menyebut fenomena seperti: sengketa perbatasan internasional, struktur keuangan global, dan pola geografis hasil pemilu (Agnew, 2003:5). Geopolitik juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mendorong pemahaman sistem perdagangan bebas internasional yang menjadi jantung ekonomi pasar global modern (Agnew and Corbridge, 1995 dalam Blacksell, 2006:10).

Dalam tatanan dunia baru masa kini, menurut Ó Tuathail (1998c:2), spesifikasi hubungan pasca-Perang Dingin antara geografi, kekuatan, dan tatanan dunia bervariasi sebagai khayalan geopolitik, bersaing satu sama lain untuk membatasi “geopolitik baru” (*new geopolitics*). Bagi sebagian orang, berakhirnya Perang Dingin telah memungkinkan kemunculan tatanan geopolitik baru yang didominasi oleh pertanyaan dan isu-isu geoekonomi; sebuah dunia di mana globalisasi kegiatan ekonomi dan arus perdagangan global, investasi, uang, dan kesan (*images*) memperbarui negara, kedaulatan, dan struktur geografis planet ini. Bagi yang lain, geopolitik baru menggambarkan dunia yang tidak lagi didominasi oleh perebutan wilayah antara blok yang bersaing, tetapi oleh munculnya masalah transnasional, seperti: terorisme, proliferasi nuklir, dan benturan peradaban. Bagi yang lainnya, hubungan politik dengan “bumi” lebih penting daripada sebelumnya, sebagaimana negara dan rakyat berjuang untuk mengatasi degradasi lingkungan, penipisan sumber daya, pencemaran lintas-negara, dan pemanasan global. Bagi penentu kebijakan dan intelektual berjiwa lingkungan, geopolitik baru bukanlah geoekonomi melainkan politik ekologi atau ekopolitik (*ecopolitics*). Mengutip pendapat Ó Tuathail, terdapat banyak visi persaingan dalam geopolitik baru, seperti terlihat dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Diskursus Geopolitik

Diskursus	Aktor Intelektual	Kosakata Dominan
Geopolitik Imperialis	Alfred Mahan	Kekuatan laut ( <i>Seapower</i> )
	Friedrich Ratzel	Ruang hidup ( <i>Lebensraum</i> )
	Halford Mackinder	Kekuatan daratan ( <i>Heartland</i> )
	Karl Haushofer	Kekuatan daratan ( <i>Heartland</i> )
	Nicholas Spykman	Daerah Batas ( <i>Rimlands</i> )
Geopolitik pada masa Perang Dingin	George Kennan	Pembendungan ( <i>Containment</i> )
	Soviet dan para pemimpin Barat/militer	Negara-negara di Dunia Pertama/ Kedua/Ketiga sebagai satelit dan <i>dominos</i> ; Blok Barat vs Timur
Geopolitik pada masa Tatanan Dunia Baru	Mikhail Gorbachev	<i>New political thinking</i>
	Francis Fukuyama	<i>The end of history</i>
	Edward Luttwak	<i>Statist geo-economics</i>
	George Bush	AS memimpin tatanan dunia baru
	Para pemimpin G-7, IMF, WTO	Liberalisme transnasional/ neoliberalisme
	Perencana strategi di Pentagon dan NATO	Negara-negara nakal, perlindungan nuklir, teroris
	Samuel Huntington	Benturan peradaban ( <i>Clash of civilizations</i> )
Geopolitik Lingkungan	Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan	Pembangunan berkelanjutan
	Al Gore	Inisiatif lingkungan strategis
	Robert Kaplan	<i>Coming Anarchy</i>
	Thomas Homer-Dixon	Kelangkaan lingkungan
	Michael Renner	Keamanan lingkungan

Sumber: Ó Tuathail (1995:5)

### 1.5.5 Strategi dan *Grand Strategy*

Istilah *strategy* berasal dari kata Yunani kuno *strategos* atau *strategus* dengan kata jamak *strategi*. *Strategos* berarti jenderal; dalam bahasa Yunani kuno sering diartikan sebagai perwira negara (*state officer*) dengan fungsi yang luas (Salusu, 1996:85). Dalam arti sempit, menurut Matloff (1967 dalam Salusu, 1996:85), strategi berarti seni jenderal (*the art of the general*). Di zaman Yunani kuno, jenderal dianggap bertanggung jawab dalam suatu peperangan, kalah ataupun menang. Ia menguasai logistik dan sumber daya militer. Ia membina pasukannya dengan keterampilan berperang secara terus-menerus dan selalu berusaha

memahami medan peperangan. Sang jenderal juga selalu memanfaatkan peluang yang memungkinkan pasukannya memperoleh kemenangan; menyuntikkan motivasi kepada pasukannya, baik sebelum berperang maupun sesudahnya.

Pada akhir abad ke-18, penggunaan istilah strategi lebih memperoleh tempat di kalangan militer, ketika peperangan masih relatif sederhana dan terbatas. Kala itu istilah *strategems* lebih populer di kalangan perwira yakni bagaimana seorang jenderal melakukan tipu daya terhadap musuhnya melalui rencana operasi, misalnya cara menggerakkan pasukan ke medan perang (Salusu, 1996: 86). Menurut Gray (1999:17), strategi dan stratejik terkadang menjadi sebuah konsep yang diperselisihkan dan juga banyak disalahgunakan. Teks ini menyadur dan menganut secara ketat definisi yang dikembangkan oleh serdadu Prusia, Carl von Clausewitz (1780-1831). Strategi mengacu pada pemanfaatan penggunaan kekuatan dan ancaman kekuatan untuk tujuan akhir kebijakan. Fokus stratejik memastikan bahwa perhatian utama akan adanya bantuan perantara berupa kekuatan militer (Gray, 2007:1). Strategi merupakan jembatan yang menghubungkan kebijakan dengan kekuatan militer (Gray, 2007:284).

Pada dekade sesudahnya, terutama pada abad ke-19 dan 20, ketika faktor militer telah bercampur dengan faktor-faktor politik, ekonomi, dan psikologis; istilah strategi muncul dengan nama baru *grand strategy* atau strategi tingkat tinggi yang berarti seni memanfaatkan semua sumber daya suatu bangsa atau kelompok bangsa untuk mencapai sasaran perang dan damai (Matloff, 1967 dalam Salusu, 1996:86). *Grand strategy* terdiri dari pekerjaan dengan maksud tertentu dari seluruh instrumen kekuatan yang ada untuk keamanan masyarakat (Gray, 2007:283). *Grand strategy* merupakan perluasan gagasan tradisional strategi dalam tiga cara: *pertama*, pengembangan strategi di luar militer, termasuk di dalamnya diplomatik, keuangan, ekonomi, informasi, dan lainnya; *kedua*, pemeriksaan internal di samping kekuatan eksternal menggunakan perhitungan baik berbagai instrumen kekuatan maupun kebijakan internal yang diperlukan bagi pelaksanaannya (misalnya wajib militer); *ketiga*, mengikutsertakan periode damai di samping masa perang (Murray, 2011:3).

Jika membandingkan tujuan dan sasaran hipotetis dari *grand strategy* yang komprehensif dengan definisi klasik strategi seperti yang disampaikan oleh Clausewitz—yang mendefinisikan strategi sebagai teori penggunaan pertempuran untuk objek perang; seseorang bisa dengan cepat menyimpulkan bahwa diperlukan definisi yang lebih luas. Sir Lawrence Freedman mendefinisikan hal itu dengan cara yang paling mendekati kebutuhan saat ini. Freedman menggambarkan strategi sebagai teori penerapan kekuasaan, di mana kekuasaan adalah kemampuan untuk menghasilkan pengaruh yang dimaksudkan (Naumann *et al.*, 2007:90-91). Bagaimanapun juga, definisi ini masih bisa disalahpahami sebagai rujukan utama bagi kekuatan militer. Orang melihat strategi sebagai penggunaan sarana untuk mencapai tujuan politik, dan akibatnya *grand strategy* dipahami sebagai seni menggunakan semua unsur kekuasaan (baik suatu bangsa atau aliansi negara-negara) untuk mencapai tujuan yang disepakati secara politik dan sasaran suatu bangsa atau persekutuan negara-negara dalam suasana damai dan perang. Sebuah *grand strategy* terdiri dari penggunaan koordinasi secara seksama dan terintegrasi penuh dari semua kekuatan politik, ekonomi, militer, budaya, sosial, moral, spiritual, dan psikologis yang ada (Naumann *et al.*, 2007:91).

Sebuah *grand strategy* yang dirancang dengan baik, menurut pendapat Fontaine and Lord (2012:6) melayani beberapa maksud berikut. *Pertama*, membantu para pembuat kebijakan untuk melihat kebijakan secara holistik dan memahami bagaimana isu-isu dan hubungan terjalin. *Kedua*, membantu pengambil keputusan dalam menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya yang terbatas. *Ketiga*, membantu birokrasi dalam mengoordinasikan kegiatan berbeda dengan menyebarkan prioritas dan menjelaskan pentingnya sasaran tertentu. *Keempat*, mengomunikasikan kepentingan dan maksud nasional untuk meyakinkan sekutu, menghalangi musuh, dan mengurangi kemungkinan salah perhitungan. *Kelima*, meningkatkan akuntabilitas kebijakan bagi pemimpin dengan menyediakan tolok ukur di mana keberhasilan atau kegagalan bisa dievaluasi. *Keenam*, memaksa para pengambil keputusan untuk berpikir secara sistematis untuk jangka menengah hingga jangka panjang, tidak hanya terfokus pada tekanan jangka pendek yang mendesak.

Menurut Naumann *et al.* (2007:91), sangat penting untuk mengenali bahwa *grand strategy* hanya dapat dirumuskan setelah tujuan dan sasaran yang diinginkan telah ditentukan. Tujuan, sasaran, dan kekuatan yang dibutuhkan untuk mencapainya merupakan asas-asas yang sangat diperlukan bagi strategi apapun. Setelah tujuan dan sasaran ditentukan, semua aspek dari persoalan yang dihadapi suatu bangsa atau persekutuan kemudian dianalisis secara menyeluruh dan dibuat evaluasi atas karakter, ukuran, dan kemampuan dari berbagai unsur yang ada di tingkat nasional maupun internasional dalam rangka untuk mengembangkan strategi yang efektif.

Peristiwa dramatis yang menandai berakhirnya Perang Dingin dan sesudah itu permulaan akhir abad ke-20, telah mengharuskan Amerika Serikat (AS) untuk mempertimbangkan kembali kebijakan keamanan nasionalnya. Muncul pertanyaan, "Apa yang harus menjadi *grand strategy* baru Amerika?" Menurut Posen and Ross (1996:5), empat strategi tingkat tinggi yang relatif memiliki ciri-ciri tersendiri dan argumen masuk akal tentang peran AS di dunia, bersaing dalam wacana publik. Keempatnya bisa diidentifikasi sebagai: *neo-isolationism*, perikatan selektif (*selective engagement*), kerja sama keamanan, dan keunggulan (*primacy*).

### 1.5.6 Geostrategi

Hari ini, pentingnya ruang sebagai tempat aktivitas ekonomi dan militer merupakan suatu keniscayaan, mirip kondisi perniagaan laut dan kekuatan angkatan laut di akhir abad ke-19. Sistem internasional multipolar pasca-Perang Dingin telah meningkatkan kesadaran akan perbedaan kekuatan dunia. Kekuatan terpusat di wilayah tertentu (misalnya Amerika Utara dan Eropa Barat); dan bagaimana antar-region berhubungan satu sama lain tergantung besarnya ukuran di mana mereka terletak (Grygiel, 2006:3). Gyorgy menuliskan,

"Perubahan terbaru dalam strategi dan taktik mengungkapkan secara lengkap dan mendasar revolusi metode klasik peperangan. Strategi perang sedang diproyeksikan pada skala seluruh dunia, diperluas dari zaman perang ke periode perdamaian yang singkat. Sebuah geostrategi baru lahir, mengembangkan lebih lanjut dogma klasik yang diajarkan dengan penuh semangat sejak era Napoleon, di mana yang menjadi sasaran seharusnya angkatan bersenjata musuh di manapun mereka berada. Teknik baru juga

mempergunakan dan memperluas definisi yang berlaku umum bahwa strategi sebagai ketentuan, persiapan, dan penggunaan angkatan bersenjata untuk memperoleh keuntungan di akhir peperangan.” (Gyorgy, 1943:347-348)

Beberapa penulis Amerika dan Inggris yang berkecimpung di bidang ilmu politik dan militer berusaha mendapatkan terjemahan yang pas dari *Wehrgeopolitik*, suatu istilah yang biasa dipakai di Jerman sekitar tahun 1932. Geopolitik pertahanan (*defense-geopolitics*) tidak mengungkapkan karakter agresif dan ofensif cabang ilmu geografi politik dari Jerman ini, sementara geopolitik perang (*war geopolitics*) yang digunakan dan dipopulerkan oleh Robert Strausz-Hupé terlalu samar dan umum. Frederick L. Schuman merujuk *Wehrgeopolitik* sebagai geostrategi dalam artikelnya *Let Us Learn Our Geopolitics* (1942). Hal ini tampaknya menjadi terjemahan paling kuat dari ungkapan asli Jerman yang diciptakan oleh Jenderal Haushofer (Gyorgy, 1943:347).

Istilah “geo-strategi” lebih sering digunakan dalam tulisan terkini, dalam konteks global yang menunjukkan pertimbangan distribusi daratan-lautan global, jarak, dan aksesibilitas antara faktor-faktor geografis lainnya dalam perencanaan dan tindakan strategik. Definisi geo-strategi berikut ini digunakan dalam kerangka regional yang lebih terbatas, di mana secara ringkasnya faktor geografis berinteraksi untuk memengaruhi atau memberi keuntungan bagi salah satu lawan, atau campur tangan untuk memodifikasi perencanaan strategik tetapi juga upaya politik dan militer (Joo-Jock, 1979:4). Kata-kata geopolitik, strategik, dan geostrategik digunakan untuk menyampaikan arti berikut: geopolitik mencerminkan kombinasi faktor geografis dan politik yang menentukan kondisi suatu negara atau wilayah, serta menekankan dampak geografi pada politik; strategik mengacu pada upaya/tindakan terencana dan komprehensif untuk mencapai tujuan utama atau aset vital bagi arti penting militer; dan geostrategik menggabungkan pertimbangan strategik dengan geopolitik (Brzezinski, 1986:xiv).

Geostrategi adalah arah geografis kebijakan luar negeri suatu negara. Lebih tepatnya, geostrategi menggambarkan di mana negara memusatkan usahanya dengan memproyeksikan kekuatan militer dan mengarahkan kegiatan diplomatik.



Asumsi yang mendasarinya adalah negara memiliki sumber daya yang terbatas dan tidak mampu, andaipun mereka tidak segan untuk melakukan kebijakan luar negeri secara habis-habisan (*tous asimuths*). Sebagai gantinya, mereka harus fokus secara politik dan militer di daerah-daerah tertentu di dunia. Geostrategi yang menggambarkan kebijakan luar negeri ini mendorong negara dan tidak berurusan dengan motivasi atau proses pengambilan keputusan. Geostrategi suatu negara tidak selalu termotivasi oleh faktor geografis atau geopolitik. Sebuah negara bisa memproyeksikan kekuatannya ke sebuah lokasi karena alasan ideologis, kepentingan kelompok, atau hanya kehendak pemimpinnya (Grygiel, 2006:23).

Menurut Rogers and Simón (2010), geostrategi adalah tentang pelaksanaan kekuasaan atas (terutama sekali) ruang kritis di permukaan bumi, tentang keahlian (*crafting*) menjalin “kehadiran” politik dalam sistem internasional. Hal ini bertujuan untuk memperkuat keamanan dan kemakmuran, membuat sistem internasional lebih sejahtera, membentuk lebih dari yang sudah/sedang terbentuk. Geostrategi adalah tentang mengamankan akses ke rute perdagangan tertentu, kemacetan strategis, sungai-sungai, pulau-pulau, dan lautan. Hal ini membutuhkan kehadiran militer yang luas, umumnya berkaitan dengan pembukaan stasiun militer di luar negeri dan pembangunan kapal-kapal perang yang memiliki kemampuan proyeksi kekuatan di perairan laut dalam. Hal ini juga membutuhkan jaringan aliansi dengan kekuatan besar lain yang berbagi tujuan bersama atau dengan *lynchpin states* yang terletak di daerah yang dianggap penting.

### 1.5.7 Geoekonomi

Cowen and Smith (2009:23) menyatakan bahwa meskipun kini popularitas geopolitik menjadi sarana penggambaran dan pertarungan konflik dan kekerasan zaman, diperlukan cara-cara baru dalam memahami perubahan geopolitik saat ini. Pada kenyataannya, geopolitik tidak hanya berbicara tentang hubungan eksternal negara, melainkan pelibatan yang lebih menyeluruh dari geopolitik sosial. Keduanya bersilangan menjalin perbedaan antara di dalam dan di luar perbatasan negara. Geopolitik sosial yang dimaknai sebagai kumpulan wilayah, ekonomi, dan tatanan sosial yang menjadi landasan dan juga akibat dari geopolitik modern; sekarang ini

dituangkan kembali dengan kemunculan geografi ekonomi dan keamanan yang tertangkap dengan baik sebagai geoekonomi beserta tatanan sosial yang menyertainya.

Sering diakui dengan penemuan istilah “geoekonomi” dalam artikelnya yang sangat berpengaruh *From Geopolitics to Geoeconomics: Logic of Conflict, Grammar of Commerce* (1990), Edward Luttwak berpendapat bahwa geopolitik menunjukkan adanya peningkatan logika historis pertukaran global. Geopolitik digantikan oleh logika ekonomi global pada masa globalisasi, yang melebihi kalkulasi geopolitik, kendatipun sistem (kondisi) nasional tetap utuh dan sangat kuat. Bagi Luttwak, globalisasi menggambarkan evolusi alamiah pasar menuju kesatuan yang lebih besar dan lebih kuat; dan peningkatan ini tidak mencakup kekuatan karena kedekatan dan wilayah di dalam dirinya. Negara perlu memperbarui modus operandinya sesuai dengan itu, dari teritorial ke pengaturan ekonomi (Cowen and Smith, 2009:38).

Luttwak pertama kali menguraikan pemahamannya tentang geoekonomi dalam sebuah artikel di *National Interest* pada tahun 1990, di mana ia menetapkan geoekonomi sebagai kelanjutan dari “logika konflik dalam tata bahasa perdagangan”. Ia memperbandingkan geopolitik dan geoekonomi, kemudian menegaskan bahwa metode perdagangan sedang menggusur metode militer dalam hubungan internasional dengan modal sekali pakai lebih penting daripada daya tembak, inovasi sipil lebih penting daripada kemajuan teknis-militer, dan penetrasi pasar menjadi penanda besar kekuasaan daripada kepemilikan garnisun dan pangkalan. Ia kemudian menjabarkan tesis ini dalam buku *The Endangered American Dream* (1993). Dalam subjudul “Cara Menghentikan Amerika Serikat Menjadi Negara Dunia Ketiga dan Cara Memenangkan Perjuangan Geoekonomi bagi Supremasi Industri”, Luttwak berpendapat bahwa geopolitik kuno telah digantikan oleh fenomena baru geoekonomi. Sekarang ini, senapan dan para diplomat kurang berarti dibandingkan dengan modal kesabaran dan tenaga kerja terampil. Sebuah “gudang persenjataan” muncul dengan versi baru: program teknologi nasional yang agresif, keuangan yang ganas, dan tarif yang menjerat, serta standar teknis yang tinggi. Jika tidak segera mengambil tindakan dramatis untuk mendukung

kekuatan ekonominya, AS akan menderita kekalahan demi kekalahan dan akhirnya bisa turun status ke sebuah negara Dunia Ketiga (Ó Tuathail, 1996:182-183).

Baru (2012:2) mendefinisikan geoekonomi dalam dua cara yang berbeda yaitu sebagai hubungan antara kebijakan ekonomi dan perubahan dalam kekuasaan dan geopolitik nasional; dengan kata lain sebagai konsekuensi geopolitik atas fenomena ekonomi atau sebagai konsekuensi ekonomi dari tren geopolitik dan kekuatan nasional. Kedua pemikiran tersebut—“perdagangan mengikuti bendera” bahwa ada konsekuensi ekonomi dari proyeksi kekuatan nasional dan gagasan “bendera mengikuti perdagangan” bahwa ada konsekuensi geopolitik dari fenomena ekonomi yang esensial—merupakan subjek kajian geoekonomi.

Menurut Sjøilen (2012:1), geoekonomi adalah studi aspek keruangan, kultural, dan strategik sumber daya dengan tujuan memperoleh keuntungan kompetitif yang berkelanjutan. Geoekonomi merupakan kelanjutan dari pemikiran geopolitik yang diterapkan dalam era globalisasi. Sebagai konsekuensinya, studi ini lebih relevan dalam konteks kesatuan strategik yang luas, misalnya negara dan perusahaan multinasional yang secara konstan berhadapan dengan isu kompetisi global. Geoekonomi merupakan sebuah alternatif yang mengarahkan kajian ekonomi secara multidisiplin.

Sjøilen (2012:8-9) menyatakan bahwa disiplin geoekonomi berbeda dengan geopolitik dalam dua hal mendasar. *Pertama*, berkenaan dengan topik, terutama tidak berkaitan dengan kegiatan politik dan militer, tetapi dengan kegiatan ekonomi. *Kedua*, berkenaan dengan pelaku, kegiatan terutama tidak dilakukan oleh individu yang mewakili negara-bangsa, tetapi oleh pekerja organisasi sektor swasta, yang terutama sekali loyal kepada pemilik organisasi tersebut. Geoekonomi, seperti halnya geopolitik, dipelajari pertama-tama dengan pemikiran kepentingan negara-bangsa atau dari perspektif makro. Hal ini membuatnya lebih kompleks daripada studi geopolitik, di mana negara itu sendiri adalah pelaku utamanya. Baik geopolitik maupun geoekonomi terkait erat dengan studi tentang strategi, di mana orang mencoba untuk mendefinisikan rencana optimal bagi tujuan organisasi atau lembaga.

Søilen (2012:12) menunjukkan bagaimana studi geoekonomi didasarkan pada pendekatan dinamis untuk ilmu-ilmu sosial yang dapat ditelusuri kembali ke teori evolusi. Ekonomi neoklasik adalah pendekatan statis untuk ilmu-ilmu sosial yang dimodelkan pada studi fisika dengan menggunakan aljabar dan teori keseimbangan (*equilibrium*). Itu merupakan upaya untuk membangun suatu studi ilmiah murni tentang manusia, menghindari nilai-nilai dan isu-isu moral sebagai alasan jelas, apapun hasilnya. Pendekatan yang diambil geoekonomi berbeda dari ekonomi klasik. Geoekonomi mendasarkan diri pada multidisiplin, pemikiran strategis global, dan tradisi teori kritis. Tidak seperti pemikiran neoklasik, geoekonomi tidak sepenuhnya didasarkan pada studi fisika, tetapi biologi.

Berdasarkan penelitian Lachininskii (2012:91-92), gambaran publikasi ilmiah tentang geoekonomi di Rusia menunjukkan bahwa dalam terminologi geoekonomi, studi tersebut terutama dipersembahkan untuk strategi perdagangan luar negeri dari Federasi Rusia dan negara-negara tertentu atau masalah geoekonomi swasta, serta ringkasan kategori geoekonomi. Orang pertama di antara ahli geografi ekonomi Rusia yang menggunakan istilah geoekonomi adalah E. B. Alaev dalam sebuah jurnal berjudul *Sotsial'no-ekonomicheskaya geografiya. Ponyatiino-terminologicheskii slovar'* (1983). Alaev memercayai bahwa istilah tersebut dapat digunakan untuk merepresentasikan sistem ekonomi spasial. Dalam pandangannya, bidang kajian ekonomi dari suatu wilayah tertentu atau *geotory* (bidang geoekonomi) merupakan sebuah interpretasi geografis ruang ekonomi (*geoeconomic space*). Namun demikian, berdasarkan analisis terhadap artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah geografi terkemuka di Rusia bahwa tidak ada geografer lain yang menggunakan istilah yang diusulkan oleh Alaev tersebut dalam penelitian mereka.

Dalam kurun waktu 10-15 tahun, menurut Lachininskii (2012:91-92) hanya ada beberapa tesis yang berkaitan dengan subjek geoekonomi yang dipertahankan dalam keilmuan geografi. Pada sejumlah karya, isu tersebut malahan tidak secara langsung disentuh. Dalam publikasi terkait, geografer dan ilmuwan sosial belum mengungkapkan secara rinci persoalan pokok kajian, seperti teori dan metodologi yang sebenarnya. Nikitina menjadi orang pertama yang meneliti pengaruh faktor

geoekonomi dalam restrukturisasi teritorial dan sektoral perekonomian nasional Ukraina dalam disertasi berjudul *Geoekonomika: ocherki* (2002). Lachininskii (2012:93) selanjutnya mempertimbangkan pendekatan teoretis dan metodologis yang ada dalam perekonomian nasional, geografi sosial, dan politik. Hasil kajiannya menunjukkan bahwa dalam konteks perekonomian nasional dan geografi sosial, tidak ada konsensus mengenai objek dan subjek geoekonomi dan keduanya dalam ilmu pengetahuan.

Tabel 1.3 Pendekatan Teoretis dan Metodologis Kerangka Kerja Ekonomi Nasional, Sosial, dan Geografi Politik dalam Geoekonomi

Pengarang	Sikap terhadap Geografi	Objek Ilmu Pengetahuan	Subjek Ilmu Pengetahuan	Metode
Gladkii	bidang interdisipliner, subdisiplin geografi	geosistem ekonomi transnasional	penonjolan formasi geosistem ekonomi transnasional	analisis geoekonomi
Nikol'skii	ranah interdisipliner	proses reproduksi geoekonomi		produksi energi dan siklus sumber daya, analisis geoekonomi, pendekatan energi
Nikitina	ranah interdisipliner, subdisiplin ilmu geografi	geosistem ekonomi transnasional		analisis geoekonomi
Zamyatin	ilmu sastra	tamsilan geospasial	kesan spasial sebagai transaksi ekonomi	pemetaan tamsilan geoekonomi
Lysak	termasuk dalam sistem ilmu geografi; mendekati geografi perekonomian dunia	ruang geoekonomi		

Sumber: Lachininskii (2012:93)

Sebagaimana telah dijelaskan Lachininskii (2012:93), subjek geoekonomi adalah ekonomi dunia global secara keseluruhan, di mana lintas-batas sistem geoekonomi terbentuk pada tingkatan yang berbeda. Geoekonomi tidak menciptakan ruang geoekonomi baru, seperti yang ditunjukkan oleh banyak penulis, melainkan mengkaji transformasi terbaru dari ekonomi global pada tingkat yang berbeda, yakni: sektoral, teritorial, peradaban, sistem, dan lainnya. Dalam konteks

ini, banyak penulis berbagi pendekatan E. V. Sapir. Pada akhirnya, Lachininskii menyimpulkan bahwa geoekonomi sebenarnya adalah “geografi baru perekonomian dunia” dan tidak diragukan lagi milik sistem keilmuan geografi, namun berbeda dengan disiplin ilmu geografi lainnya. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan interdisipliner yang luas dengan ilmu-ilmu terkait: ekonomi global, geopolitik dan geostrategi, ilmu politik, sosiologi, dan lain-lain.

Lebih jauh, Lachininskii (2012:93) membedakan lima tingkat studi geoekonomi yang dapat dianggap sebagai arah tren geoekonomi saat ini. *Pertama*, pembentukan kawasan transnasional tertentu sebagai sebuah kerangka acuan ruang ekonomi dunia global. *Kedua*, pembentukan dan pengembangan rantai produksi, jasa, dan keuangan global, serta jaringan lintas batas sebagai elemen kunci dari ruang ekonomi dunia global. *Ketiga*, pengembangan pusat-pusat inovasi global dan regional sebagai titik pertumbuhan bagi ruang ekonomi dunia global. *Keempat*, pengembangan dan pengaruh kota-kota global dan regional sebagai titik utama pertumbuhan bagi ruang ekonomi dunia global. *Kelima*, pengembangan integrasi geoekonomi dari daerah dan negara-negara yang berkontribusi terhadap evolusi lebih lanjut dari ruang ekonomi dunia global.

Merujuk pendapat Neklessa, geoekonomi menguji lima subjek: imperatif geografis (*geographical imperative*), kekuasaan dan instrumen yang sebenarnya, kebijakan dan strategi untuk meningkatkan daya saing suatu negara di era globalisasi, lokalisasi spasial dalam alam semesta global yang baru dan berbeda jenis kegiatan ekonominya, serta pembentukan interaksi strategis dan dasar-dasar pemerintahan global. Empat dari lima bidang subjek geoekonomi dari Neklessa berbicara bahasa geografis (Lachininskii, 2012:95).

Menurut Sjøilen (2012:21), disiplin ilmu geoekonomi dan geopolitik terjalin dengan erat. Disiplin ilmu geopolitik memiliki beban penuh masa lalu dan hanya dapat berkembang melalui kritik diri, yakni melalui kritik dari disiplin ilmu itu sendiri. Misalnya harus membuat apa yang jelas dalam sasaran geopolitik dan apa saja yang normatif. Sejauh ini, sebagian besar kritik datang dari luar, dari lawan-lawannya, apakah mereka mewakili geopolitik kritis (*critical geopolitics*), geografi politik, atau ilmu politik arus utama.

Adanya pergeseran dari geopolitik ke geoekonomi, menurut Sjøilen (2012:21-22) menjadikan fokus telah berbalik dari pemikiran militer ke arah fenomena ekonomi. Maksud dari studi yang baru ini adalah untuk menunjukkan bagaimana mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif nasional dengan cara ekonomi. Perang tidak lebih dari cara terakhir untuk mencapai tujuan yang sama. Jika seseorang memilih perang, sebaiknya pastikan bahwa itu akan benar-benar membawa ke arah perekonomian yang bertambah baik. Berbagai petualangan militer, seperti yang telah ditunjukkan AS sejak PD II, hanya menguntungkan angkatan bersenjata dan industri persenjataan. Mereka telah memiskinkan bangsa dan mengecewakan rakyatnya. Mereka yang kehilangan nyawa di medan perang terutama berasal dari kelas yang kurang beruntung dalam masyarakat, bukan dari kelas menengah yang besar. Bila melihat peristiwa yang lalu, mudah untuk melihat bagaimana militer AS tergoda untuk mulai meminjam uang guna membayar petualangan ini. Hal ini merupakan satu-satunya alternatif bagi kaum kiri. Pembentukan militer dan industri senjata di AS, sejak saat itu bekerja dalam simbiosis, mengedepankan para politisi mereka tanpa kepedulian nyata bagi masa depan negara. Logika yang sama telah tampak di negara-negara Barat lainnya, sementara di Amerika Latin, Afrika, dan Asia hanya terkait dengan kediktatoran militer. Hal ini menyatakan bahwa geoekonomi, tidak seperti geopolitik, memiliki fokus yang lebih kuat pada pembangunan sosial karena lebih berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan fenomena globalisasi.

Segalanya adalah politik, dan politik pada akhirnya berkisar ekonomi. Telah terjadi pergeseran umum ke arah kepentingan ekonomi “mentah” di antara negara-bangsa karena mereka semakin bergantung kepada SDA yang dibutuhkan untuk menjalankan masyarakat industri modern. Sjøilen melihat adanya peningkatan persaingan tidak hanya untuk minyak, tetapi juga untuk logam seperti emas dan tembaga, kayu (terutama kayu keras), dan dalam waktu dekat adalah air. Merujuk Klare, hal ini mendefinisikan geografi konflik baru yang akan bertahan setidaknya untuk beberapa waktu ke depan. Ini menggambarkan pergeseran dari logika geopolitik ke geoekonomi dan menyarankan arena geografis baru yang relevan bagi keunggulan kompetitif bangsa (Sjøilen, 2012:42).

Geoekonomi secara bertahap mengambil alih geopolitik. Pergeseran ini ditunjukkan oleh timbulnya proses yang dikenal sebagai globalisasi, generasi tua yang sekarang masih dalam masa pertumbuhan, di mana pemerintah dan lembaga pemerintah telah menemukan bahwa mereka tidak lagi menjadi aktor-aktor kunci tak tertandingi dan pengawas dari peristiwa dunia. Proses ini merupakan hasil akhir dari Perang Dingin dan menandai pergeseran fokus dari ideologi politik menuju realitas ekonomi (Søilen, 2012:45).

### **1.5.8 Manajemen Strategik**

Menurut Steiss (2003:1), manajemen strategik melibatkan pengembangan strategi dan perumusan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam proses ini, perhatian harus diberikan kepada strategi eksternal dan kemampuan internal. Manajemen strategis menawarkan kerangka kerja di mana sebuah organisasi dapat beradaptasi dengan tingkah laku lingkungan yang tak terduga dan masa depan yang tidak menentu. Sebuah antarmuka disediakan antara kapasitas kinerja dari suatu organisasi dan peluang dan tantangan yang harus dihadapi dalam lingkungan yang lebih luas. Manajemen strategik berhubungan dengan kaitan sumber daya organisasi terhadap tantangan dan peluang dalam lingkungan yang lebih besar dan penentuan arah jangka panjang relatif terhadap sumber daya dan peluang.

Dalam arti militer, strategi melibatkan perencanaan dan pengarahan pertempuran atau kampanye dalam skala yang luas, yaitu tanggung jawab umum. Dalam konteks ini, strategi dibedakan dari taktik, yang melibatkan inisiasi tindakan untuk mencapai tujuan yang lebih mendesak. Dalam dunia bisnis, bagaimanapun, “strategi” sering digunakan untuk merujuk pada tindakan spesifik yang diambil untuk mengimbangi tindakan aktual atau potensial dari para pesaing. Dalam pengertian yang lebih mendasar, istilah tersebut menunjukkan keterkaitan dengan proses penentuan sasaran, perumusan tujuan yang lebih mendesak, dan pemilihan tindakan spesifik yang dibutuhkan dalam penerapan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut (Steiss, 2003:1-2).



Menurut Kuncoro (2006:1-2), definisi strategi yang dikemukakan oleh para ahli—seperti: Chandler, Andrews, dan Itami—mempunyai banyak kesamaan. Frase “tujuan jangka panjang” dan “kebijakan umum” menyiratkan bahwa strategi seharusnya berkaitan dengan keputusan “besar” yang dihadapi organisasi dalam melakukan bisnis, yakni suatu keputusan yang menentukan kegagalan dan kesuksesan organisasi. Penekanan pada “pola tujuan” dan “kerangka kerja” menyatakan bahwa strategi berkaitan dengan perilaku yang konsisten, maksudnya ketika suatu strategi telah ditetapkan, maka perusahaan tidak dapat menariknya kembali. Kemudian yang terakhir, ide bahwa strategi “menetapkan perusahaan macam apa dan bagaimana seharusnya” menyatakan bahwa keputusan stratejik yang dibuat perusahaan seharusnya mampu menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan, yang nantinya akan menentukan sukses tidaknya perusahaan dalam lingkungan yang kompetitif.

Sebagian besar organisasi yang kompleks berurusan dengan enam elemen keputusan strategis (lihat Tabel 1.4). Keputusan seluruh enam dimensi ini memberikan arahan secara keseluruhan untuk semua kegiatan pengelolaan selanjutnya dalam organisasi. Variabel-variabel ini juga bertindak sebagai kendala terhadap keputusan di masa depan. Elemen keputusan strategis, dengan demikian menghubungkan organisasi total dengan lingkungannya dan memberikan persatuan dan arah bagi semua kegiatan organisasi (Steiss, 2003:2).

Tabel 1.4 Elemen Keputusan Strategis

Misi Dasar	Dasar tujuan dan prinsip-prinsip panduannya bagi perilaku organisasi.
Kelompok Sasaran	Klien atau dermawan kegiatan program dari organisasi.
Tujuan dan Sasaran	Apakah organisasi berusaha untuk mencapai melalui programnya: umum (tujuan) dan khusus (sasaran)?
Program/Jasa campuran	Jenis program dan kegiatan administrasi yang ditawarkan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
Wilayah Layanan Geografis	Batas fisik dari program organisasi.
Keuntungan Komparatif	“Keuntungan Diferensial” yang diinginkan atas organisasi lain terlibat dalam kegiatan program serupa.

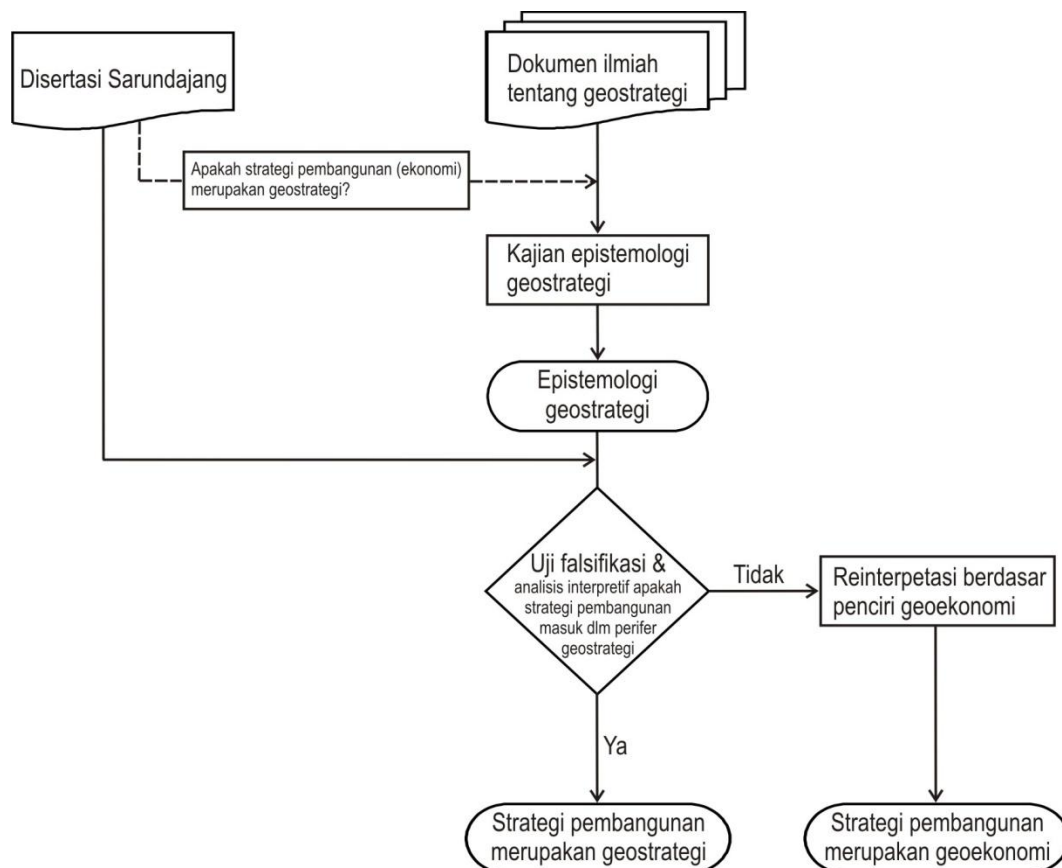
Sumber: Steiss (2003:2)

Kuncoro (2006:12-13) menjelaskan beberapa konsep dasar yang dipergunakan dalam manajemen strategik. *Pertama*, *strategic competitiveness* yang tercapai bila suatu perusahaan berhasil memformulasikan dan mengimplementasikan suatu strategi yang menciptakan “nilai” (*value-creating strategy*). Nilai dalam konteks ini adalah sesuatu yang dicari konsumen, yaitu: harga yang murah, produk yang berkualitas, merek yang terkenal, keunikan, pelayanan purna jual, dan sebagainya. *Kedua*, strategi yaitu sejumlah keputusan dan aksi yang ditujukan untuk mencapai tujuan (*goal*) dan menyesuaikan sumber daya organisasi dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan industrinya. Ciri strategi yang utama adalah *goal-directed actions*; aktivitas yang menunjukkan “apa” yang diinginkan organisasi dan “bagaimana” mengimplementasikan, mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber daya dan kapabilitas), serta memerhatikan peluang dan tantangan. *Ketiga*, *sustained competitive advantage* yang terjadi bila suatu perusahaan mengembangkan strategi di mana para pesaing tidak mengimplementasikannya secara bersamaan, melakukan sesuatu yang lebih baik daripada pesaing lain, atau melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh pesaing lain. Keunggulan kompetitif berkelanjutan berarti menunjukkan upaya perusahaan/ organisasi dalam jangka panjang, yang mampu mempertahankan posisi keunggulan kompetitif dalam industri. *Keempat*, keuntungan di atas rata-rata, merupakan keuntungan (*return*) yang diperoleh melebihi apa yang diharapkan investor atas perolehan dari investasi lain dengan risiko yang sama. Di atas rata-rata (*above average*) menunjukkan komparasi kinerja yang melebihi perusahaan yang lain dalam industri yang sama.

## 1.6 Kerangka Pemikiran

Bertolak dari permasalahan yang diangkat: apakah strategi pembangunan ekonomi merupakan geostrategi, atau malah merupakan geoekonomi; sehingga konsepsi strategi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara sebagai geostrategi yang dituliskan Sarundajang akan dikaji menggunakan metode kualitatif interpretif fenomenologi deduktif dengan sasaran epistemologi (deduktif) geostrategi. Wilayah kajian epistemologi adalah tentang teori pengetahuan, tentang sumber

(rasio-empiris), sarana, batas-batas (ruang dan waktu), struktur (subjek-objek), dan keabsahan (teori kebenaran) sebuah sistem pengetahuan. Meminjam kerangka pikir Mas'ood (1994:1-39) dalam menguraikan Epistemologi Ekonomi-Politik Internasional, kajian ini akan menjawab sekelompok pertanyaan pokok berikut. Apa yang dimaksud dengan pendekatan geostrategi? Dimensi kehidupan dan proses sosial apa saja yang menjadi sasaran studinya? Mengapa diperlukan pendekatan ini? Pengetahuan apa yang telah dihasilkan mengenai fenomena geostrategi? Bagaimana pengetahuan itu diperoleh? Apa sumbangan pengetahuan tersebut terhadap pemahaman mengenai persoalan yang dihadapi dunia? Agenda penelitian geostrategi apa yang sedang/akan dikembangkan oleh ilmuwan sosial?



Gambar 1.2 Bagan Alir Pemikiran Penelitian

Berpijak dari uraian epistemologi geostrategi dan analisis interpretif, akan terlihat apakah strategi pembangunan ekonomi Sulawesi Utara termasuk dalam perifer geostrategi. Jika dalam uji kebenaran tersebut ditemukan bahwa strategi

pembangunan tidak masuk dalam perifer geostrategi, dilakukan reinterpretasi ke bidang keilmuan geoekonomi berdasarkan variabel pencirinya—mengacu sepuluh variabel geoekonomi (beserta elemennya) dari Klaus Solberg Sørensen, yaitu: kepercayaan (sasaran, tujuan, misi), posisi (ide bisnis, strategi), sumber daya (kekuatan finansial, kepemilikan), bobot penekanan (jumlah karyawan, pangsa pasar, faktor yang menjadi kunci kesuksesan), kekuatan (tingkat kompetensi umum, kesesuaian antara kompetensi dan bisnis), struktur (struktur organisasi dan kultur), basis (bangunan, tanah/lahan, aset), keamanan (kewenangan yang sah menurut hukum), komunikasi (bahasa), dan perluasan/ekspansi (produk yang dapat diekspor dan kultur perusahaan).

### 1.7 Metodologi

Merujuk Muhadjir (2007:206-210), dalam melakukan kajian ini digunakan metode kualitatif interpretif fenomenologi deduktif. Analisis filsafat fenomenologi berlandaskan data interpretif, analisis interpretif, dan kesimpulan interpretif. Data, analisis, dan kesimpulan yang dibuat bersifat holistik berdasar kebenaran esensialnya. Uji kebenaran dengan falsifikasi ditujukan untuk mengumpulkan bukti-bukti pada perifer mana geostrategi berlaku dan tidak berlaku, bukan untuk menolak konsepsi strategi pembangunan Sarundajang. Pengujian falsifikasi akan memudahkan dalam menajamkan daerah keberlakuan *grand-theory*, di mana ditemukan kawasan benar dan kawasan salah dari *grand-theory*. Sebagai *grand-theory* adalah geostrategi. Jika strategi pembangunan ekonomi yang diwacanakan Sarundajang di luar perifer geostrategi, dilakukan reinterpretasi ke bidang keilmuan lain yakni geoekonomi, berdasarkan variabel pencirinya yakni sepuluh variabel geoekonomi dari Klaus Solberg Sørensen.

Jenis data yang dibutuhkan yaitu: (1) konsep pemikiran Sarundajang tentang strategi pembangunan ekonomi berbasis “geostrategi Sam Ratulangi-an”; (2) epistemologi geostrategi yang menjelaskan realitas ilmu geostrategi dalam sebuah hierarki yang sistematis; dan (3) penanda geoekonomi. Berikut dalam Tabel 1.5, Tabel 1.6, dan Tabel 1.7; data-data yang diinterpretasikan. Data-data tersebut bersumber dari dokumen ilmiah dan internet, meliputi: disertasi, buku,

Tabel 1.5 Data Interpretif Konsep Pemikiran Sarundajang tentang Strategi Pembangunan Berbasis “Geostrategi Sam Ratulangi-an”

Konsep	Isi/Muatan
Konsepsi "Sam Ratulangi-an" tentang pembangunan berbasis geostrategi dan ketahanan lokal	pemikiran visioner Sam Ratulangi dan relevansinya dalam konteks kekinian
	pembangunan sebagai geostrategi
	ketahanan lokal sebagai unsur ketahanan nasional
	konsep pembangunan berorientasi Pasifik
Sulawesi Utara dalam struktur politik ekonomi Asia Pasifik	geografi Sulawesi Utara di kawasan Asia Pasifik
	Sulawesi Utara dalam konteks negara kepulauan Indonesia sebagai hub KTI bagian utara
	potensi Sulawesi Utara (SDA, pariwisata, sosial budaya, SDM, stabilitas keamanan)
	pengembangan potensi industri unggulan (industri pariwisata, perikanan dan kelautan, perkebunan)
Ketahanan lokal dan daya saing Sulawesi Utara dengan konsepsi geostrategis Sam Ratulangi-an	kebijakan industrialisasi daerah berbasis ketahanan lokal (pengembangan daya tarik investasi, kewirausahaan lokal, perkuatan ekonomi/industri/bisnis lokal, promosi investasi)
	kebijakan industri berbasis geostrategi (pengembangan infrastruktur dan transportasi, tata ruang pro bisnis, pengembangan telekomunikasi, ketenagakerjaan, kebijakan pajak daerah dan insentif, energi, perumahan dan permukiman, <i>upgrading</i> industri lokal, <i>branding</i> daerah)
	kebijakan pemberdayaan masyarakat dan perencanaan kota ( <i>urban planning</i> )
	kebijakan pembangunan berkelanjutan
	reformasi birokrasi dan kemitraan pemda dan swasta ( <i>public-private partnership</i> )
	pilar daya saing daerah dengan kebijakan Sistem Informasi Daerah - SID (Lembaga Riset Daerah, universitas daerah berbasis kebutuhan lokal, forum pertemuan tiga pilar SID, Lembaga Diseminasi Informasi Inovasi)
Rencana aksi strategis menuju Pintu Gerbang Indonesia	strategi merebut peluang di Pasifik (solusi efisiensi dan daya saing nasional Indonesia, KEK Manado-Bitung)
	sinergitas pembangunan KTI (politik kebijakan keseimbangan keuangan wilayah kepulauan, hub KTI, rencana aksi pengembangan)
	kerja sama regional BIMP-EAGA
	upaya membangun citra (WOC, CTI Summit, Sail Bunaken 2009)
	tantangan dalam implementasi strategi Sam Ratulangi-an (SDM, <i>political-will</i> Pemerintah, otonomi daerah/desentralisasi/kerja sama daerah, kepemimpinan daerah, peran ICT)
	model pembangunan yang dikembangkan

Tabel 1.6 Rancangan Sistematika Ilmu Geostrategi

Bahasan	Sub-bahasan
Makna dan ruang lingkup	peristilahan geopolitik, geostrategi; batas-batas (ruang dan waktu)
Mengapa geostrategi?	Mengapa diperlukan pendekatan ini?
Perkembangan historik	Pra-Modern dan Imperialis
	Masa Keemasan ( <i>Golden Age</i> )
	Masa Perang Dingin
	Pasca-Perang Dingin
	Era Abad ke-21
Perkembangan intelektual	Mahan - <i>Seapower</i> ; Ratzel - <i>Lebensraum</i> ;
	Kjellén - <i>Geopolitics</i> ; Mackinder - <i>Heartland</i> ;
	Haushofer - <i>German Geopolitik</i> ; Spykman - <i>Rimland</i> ;
	Kennan - <i>Containment</i> ; Cohen - <i>Geostrategic Regions</i> ;
	Kissinger - <i>Polarity of the International System</i> ;
Taksonomi teori	Brzezinski - <i>Grand Chessboard</i>
	Kekuatan daratan ( <i>Landpower</i> ) vs Kekuatan lautan ( <i>Seapower</i> )
Pengetahuan apa yang telah dihasilkan mengenai fenomena geostrategi?	Geostrategi Jerman vs Geostrategi Anglo-Amerika
Agenda ke depan	Isu, teori, dan proposisi
	(1) Kebangkitan Asia Timur; (2) Keamanan Laut dan Jalur Perdagangan; (3) Energi untuk Masa Depan; (4) <i>Cyberspace</i> ; (5) Tantangan bagi Indonesia

Tabel 1.7 Variabel Penciri Geoekonomi Menurut Sørensen

Variabel	Geopolitik/Geostrategi	Geoekonomi
kepercayaan	nilai-nilai	sasaran, tujuan, misi
posisi	lokasi geografis, ukuran	ide bisnis; strategi
sumber daya	sumber daya alam	kekuatan finansial, kepemilikan
bobot penekanan	ukuran populasi	jumlah karyawan, pangsa pasar, faktor yang menjadi kunci kesuksesan
kekuatan	pendidikan; pengetahuan	tingkat kompetensi umum, kesesuaian antara kompetensi dan bisnis
struktur	stabilitas politik; peraturan/hukum, organisasi	struktur organisasi dan kultur
basis	infrastruktur	bangunan, tanah/lahan, aset
keamanan	militer	kewenangan yang sah menurut hukum
komunikasi	bahasa	bahasa
perluasan/ekspansi	budaya “ngepop” yang dapat diekspor	produk yang dapat diekspor dan kultur perusahaan

Sumber: Sørensen (2012:81)

tesis, jurnal, artikel, review, monograf, laporan, dan berita di media massa. Untuk mengurai konsepsi pemikiran Sarundajang tentang strategi pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara berbasis “geostrategi Sam Ratulangi-an”, digunakan pendekatan kompleks wilayah, yaitu dengan menganalisis keterkaitan sistem di dalam wilayah (Sulawesi Utara) dan antarwilayah (KTI, ASEAN, Asia Pasifik). Menurut Yunus (2010:156-158), keterkaitan antarelelemen dalam sistem wilayah dapat berwujud aksial (satu elemen memengaruhi elemen lain secara searah), interaksial (hubungan saling memengaruhi antarelelemen), dependensial (hubungan aksional yang tidak hanya memengaruhi, tetapi menentukan eksistensi/sifat elemen lain), dan interdependensial (hubungan saling menentukan atau saling tergantung). Teknik pengumpulan data dengan analisis interpretif.

### **Ringkasan**

Dalam disertasi berjudul *Geostrategi Provinsi Sulawesi Utara Sebagai Pintu Gerbang Indonesia di Kawasan Asia Pasifik*, Sarundajang mengangkat butir-butir pemikiran ekonomi-politik kawasan Pasifik dari Sam Ratulangi yang terdapat dalam buku *Indonesia in den Pacific. Kernproblemen van den Aziatischen Pacific* (1937), merevitalisasinya menjadi ”geostrategi Sam Ratulangi-an”, dan menerjemahkannya dalam wacana strategi pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Menurut Sarundajang, pembangunan sebagai geostrategi merupakan konsep kebijakan dan strategi pembangunan yang tidak hanya bermotif keuntungan secara ekonomis semata, tetapi juga yang mempunyai tujuan atau motif bersifat “politik-strategik”, yaitu pembangunan yang mampu membawa kejayaan suatu negara di berbagai bidang. Menurut penulis, ada pemaknaan geostrategi yang ditinggalkan oleh Sarundajang, yakni arti penting militer. Sebagaimana para ahli strategi/geostrategi berpendapat bahwa geostrategi berkaitan dengan strategi, baik perencanaan strategik, tindakan strategik, maupun arti penting militer dalam memengaruhi politik luar negeri. Jika menelusuri konsepsi strategi, kluster, daya saing, ketahanan lokal, pola angsa terbang, rantai nilai global, dan peta jalan yang dituliskan; boleh jadi strategi pembangunan Provinsi Sulawesi Utara yang diwacanakan Sarundajang merupakan geoekonomi.

Penelitian ini akan menguji “kebenaran” buah pemikiran Sarundajang tentang strategi pembangunan ekonomi sebagai geostrategi secara epistemologis. Berpijak dari uraian epistemologi geostrategi dan analisis interpretif, akan terlihat apakah strategi pembangunan ekonomi termasuk dalam perifer geostrategi. Jika dalam uji kebenaran tersebut ditemukan bahwa strategi pembangunan ekonomi tidak masuk dalam perifer geostrategi, dilakukan reinterpretasi ke bidang keilmuan geoekonomi berdasarkan variabel pencirinya yakni sepuluh variabel geoekonomi beserta elemennya dari Klaus Solberg Søylen. Dalam melakukan kajian, digunakan metode kualitatif interpretif fenomenologi deduktif. Analisis filsafat fenomenologik berlandaskan data interpretif, analisis interpretif, dan kesimpulan interpretif. Uji kebenaran dengan falsifikasi ditujukan untuk mengumpulkan bukti-bukti pada perifer mana geostrategi berlaku dan tidak berlaku. Pengujian falsifikasi akan memudahkan dalam menajamkan daerah keberlakuan *grand-theory*, di mana ditemukan kawasan benar dan kawasan salah dari *grand-theory*—dalam hal ini geostrategi.